

BAB V

Kesimpulan

Makanan pokok adalah kebutuhan logistik yang tidak dapat dilakukan substitusi. Mengingat sejarah, dimana suatu negara yang kuat sekalipun dapat roboh jika kebutuhan logistiknya mengalami peningkatan namun dalam sisi produktivitasnya mengalami hambatan. Seperti Jerman yang kalah pada Perang Dunia I akibat blokade Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk mencegah Jerman mendapat sokongan logistik dari luar Eropa. Akibatnya, Jerman menyerah kalah pada Perang Dunia I bukan karena kekurangan persenjataan namun akibat suplai logistik yang habis.

Pola peningkatan kuota produksi beras dan pola penurunan kuota konsumsi beras nasional per-tahun merupakan indikator untuk mengukur apakah sebuah negara mampu berswasembada beras. Namun, manajemen ketahanan pangan nasional yang tidak mencakup wilayah pedesaan yang notabene penghasil komoditas beras, terutama di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga surplus beras mayoritas "ditimbun" oknum masyarakat di tempat-tempat seperti penggilingan padi, gudang, dan sebagainya, menjadikan alasan pemerintah untuk terus mengimpor beras terutama dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Dengan kata lain, kalkulasi kebutuhan beras nasional diukur berdasarkan kalkulasi stok beras yang berada di gudang Bulog, bukan kombinasi stok Bulog dan beras yang berada di tangan oknum pelaku pasar. Selain itu, peningkatan

produktif (18-59 tahun) berbanding menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor tanaman pangan sebesar 2% per-tahun dari tahun 2010 hingga 2014.

Penghapusan tarif impor komoditas-komoditas strategis di ASEAN harapannya memberikan efek positif dan signifikan terhadap roda perekonomian masing-masing negara anggota. Namun, ekspektasi ini tidak sepenuhnya tercapai karena beberapa negara, terutama Indonesia, menyatakan bahwa beberapa komoditas-komoditas strategis seperti beras, sebagai makanan pokok, dan gula, sebagai komoditas dengan konsumen yang sangat besar, merupakan komoditas yang sensitif. Sehingga, Indonesia menolak pengikutsertaan beras dan gula dalam liberalisasi komoditas di MEA 2015.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan melakukan penolakan liberalisasi komoditas beras dalam MEA 2015 dengan alasan:

1. Menjaga kedaulatan pangan nasional yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Liberalisasi beras akan berdampak pada tujuan nasional Republik Indonesia, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, karena beras local kalah bersaing dengan beras impor asal Vietnam dan Thailand yang memiliki kualitas yang lebih unggul dan dijual dengan harga murah. Hal ini berimplikasi pada kerugian bagi sector pertanian di Indonesia yang merupakan sector penyerap tenaga kerja terbesar, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 31,4 juta jiwa dan 54% adalah petani di bidang tanaman pangan. [BPS 2013]. Pertumbuhan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan luas lahan untuk kawasan pertanian makanan pokok, sehingga dapat diprediksi Indonesia akan terus mengimpor beras

2. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap sector pertanian untuk akselerasi peningkatan produktivitas komoditas beras dengan berbagai program agar komoditas beras dapat diikutsertakan tiga tahun setelah MEA 2015. Seperti PISAgro (Partnership of Indonesia Sustainable Agriculture) dan ASEAN Integrated Food Security (AIFS). Selain itu, pemerintah akan seoptimal mungkin membeli stok beras yang ada di lumbung petani sehingga stok beras di Bulog dapat mencapai standar, dan impor beras jenis medium dapat diminimalisasi.
3. Pada akhirnya, kesejahteraan umum dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan manajemen suatu komoditas yang vital bagi kelangsungan hidup sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya di pulau Jawa, yaitu Beras. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bersinergi untuk mengutamakan kepentingan nasional Republik Indonesia, salah satunya dengan peraturan kebijakan yang berhubungan dengan komoditas beras.